

Investor Asia Pasifik Berminat Tanam Modal

JAKARTA — Perusahaan dari sejumlah negara di kawasan Asia Pasifik tertarik menanamkan modal mereka dalam proyek infrastruktur di Indonesia melalui skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah atau PINA.

Deandra Syarizka

deandra.syarizka@bisnis.com

CEO PINA Ekoputro Adijayanto mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut menyatakan ketertarikan mereka terhadap proyek jalan tol, bandar udara, dan tenaga listrik.

Perusahaan-perusahaan tersebut berasal dari China, Jepang, Kanada, Australia, dan Korea Selatan.

"Jenis perusahaannya pun beragam dari perusahaan infrastruktur hingga pengelola dana jangka panjang," ujarnya dalam konferensi pers PINA Day, Kamis (18/1).

Menurut Eko, salah satu investor yang menyatakan keseriusannya adalah Huatsing Housing Holding Co. Ltd. yang telah menandatangani perjanjian investasi dengan PINA.

Perusahaan itu berminat mendanai empat proyek infrastruktur prioritas tertinggi yaitu divestasi PT Waskita Toll Road untuk jalan tol Trans-Jawa, PLTU Meulaboh 2 x 200 MW yang dibangun oleh PT PP Energi, Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB), dan pembangunan apartemen kelas menengah.

Tak tanggung-tanggung, komitmen pencairan awal investasinya mencapai US\$1,80 miliar pada Januari, Maret, dan September 2018.

Adapun, kata Eko, penandatanganan perjanjian investasi PT Waskita Toll Road untuk jalan tol Trans-Jawa dan PLTU Meulaboh 2 x 200 MW akan diteken pada Februari mendatang.

Dia menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan pembiayaan ekuitas untuk dua proyek infrastruktur melalui skema PINA

itu dapat dirampungkan pada kuartal pertama tahun ini dengan target perolehan dana mencapai US\$825 juta atau setara Rp11 triliun.

PINA berfungsi memfasilitasi, menyediakan *pipeline* proyek, hingga membentuk ekosistem investasi untuk proyek infrastruktur.

Untuk fasilitas pembiayaan melalui PINA, pihaknya tidak memberi penjaminan pemerintah. Oleh karena itu, proyek infrastruktur yang ditawarkan harus memenuhi tingkat kelayakan dengan *internal rate of return* minimal 13% dan harus *bankable*.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan kita selesaikan yang Waskita Toll Road dan PLTU Meulaboh. Untuk Waskita Toll Road, masih ada satu tahap lagi, kurang lebih kebutuhannya

Rp6,50 triliun sampai Rp7 triliun," paparnya.

Eko mengemukakan bahwa saat ini terdapat 34 proyek infrastruktur senilai total Rp348,20 triliun yang terdaftar dalam pipeline proyek PINA dan siap ditawarkan kepada investor potensial selama 2 tahun mendatang.

Proyek itu terdiri atas 19 proyek jalan tol senilai Rp148,60 triliun, 4 proyek penerbangan baik itu bandara dan pesawat Rp58,50 triliun, 10 proyek pembangkit dan transmisi listrik Rp127,60 triliun, dan 1 proyek pariwisata Rp13,50 triliun.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan bahwa selain terbuka terhadap investasi asing, pihaknya juga mendorong perusahaan pengelola dana jangka panjang dalam negeri untuk berinvestasi langsung di proyek infrastruktur.

"Bekerja sama dengan asing wajar karena kita memang butuh tambahan modal. Namun, salah satu pencapaian yang ingin kami dorong adalah makin banyak investor infrastruktur berasal dari Indonesia sendiri, bahkan dalam bentuk koperasi

sekali pun," ungkapnya.

Menteri Bambang menyinggung PT Kopelindo Infrastruktur, anak usaha koperasi karyawan Bulog, yang membentuk perusahaan patungan dengan investor asal China, Huatsing Housing Holding Co. Ltd. dalam menggarap sejumlah proyek infrastruktur di Tanah Air.

Selain itu, dia menambahkan bahwa pengelola dana pensiun dan dana haji juga dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam pembangunan infrastruktur nasional.

Menurutnya, peran swasta dalam pembangunan infrastruktur bisa menjadi lebih masif karena keterlibatan dana pensiun, seperti yang lazim terjadi di Negara maju seperti Australia, Kanada, dan Jepang.

STOK INFRASTRUKTUR

Pada kesempatan yang sama, Bambang mengungkapkan bahwa stok infrastruktur Indonesia masih berada pada level 38% terhadap PDB atau jauh di bawah rata-rata standar dunia yakni 70% terhadap PDB. Stok infrastruktur adalah infrastruktur yang sudah dibangun dan beroperasi.

Menurutnya, posisi stok infrastruktur sebelum 1998 mencapai 49% terhadap PDB. "Sekarang 38%, secara *value* lebih besar karena PDB Indonesia lebih besar."

Dengan kondisi ini, Bambang menegaskan bahwa pemerintah berniat meningkatkan stok infrastruktur hingga 40%-45% terhadap PDB. Pasalnya, pemerintah ingin infrastruktur menjadi pendorong percepatan pembangunan.

"Bukan faktor yang nantinya menghambat," tegasnya.

Selain itu, pemerintah tidak ingin mendengar daya saing Indonesia turun akibat kurangnya pembangunan infrastruktur.

Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas pemerintah. Namun, upaya peningkatan stok infrastruktur tidak bisa hanya mengandalkan investasi pemerintah melalui APBN. "Kalau ingin mengejar harus *all out*, semua pihak harus terlibat." (Hadijah Alaydrus) E

